



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BADUNG

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berakhlak Politya, Humaan, Lanyan
Noma, Loy, Adagel Kabupaten

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024



TIM PENYUSUN

Penanggungjawab

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Ketua

Plt.Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
BPS Kabupaten Badung

Penyunting/Editor

Perencana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Pengolah Data

Tim SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Penata Letak

Perencana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi

Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugrahanya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Penyusunan LkjIP Tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat pertanggungjawaban Kinerja Pembangunan di Bidang Pertanian dan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2024, yang diukur dengan 4 indikator kinerja utama untuk pencapaian 4 sasaran strategis dengan di dukung 9 Program, 25 Kegiatan serta 45 Sub Kegiatan dan telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja (Renja) 2024

Kami menyadari bahwa LKjIP ini belum sempurna seperti yang diharapkan, untuk itu usul, saran dan masukan dari semua pihak untuk upaya perbaikan sangat kami hargai, namun secara umum masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung selama Tahun 2024 sebagai implementasi dari RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026.

Mangupura, 26 Februari 2024
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung,



Dr. I Wayan Wijana S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671004 198812 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GRAFIK	IV
RINGKASAN EKSEKUTIF	V
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung	2
1.3 Ruang Lingkup	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Indikator Kinerja Utama	12
2.3 Rencana Kerja	13
2.4 Perjanjian Kinerja	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Pengukuran Kinerja	23
3.2 Analisis Capaian Kinerja	24
3.3 Aspek Keuangan	44
3.4 Prestasi yang diraih	52
BAB IV. PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Rekomendasi	55
4.3 Program Inovasi.....	56

Lampiran-Lampiran

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2024	12
Tabel 2.2	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2024	13
Tabel 2.3	Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2024.....	21
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2024	24
Tabel 3.2.1	Capaian Peningkatan Produksi Strategis dalam negeri Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2024	25
Tabel 3.3.1	Analisa Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Makanan Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2024	39

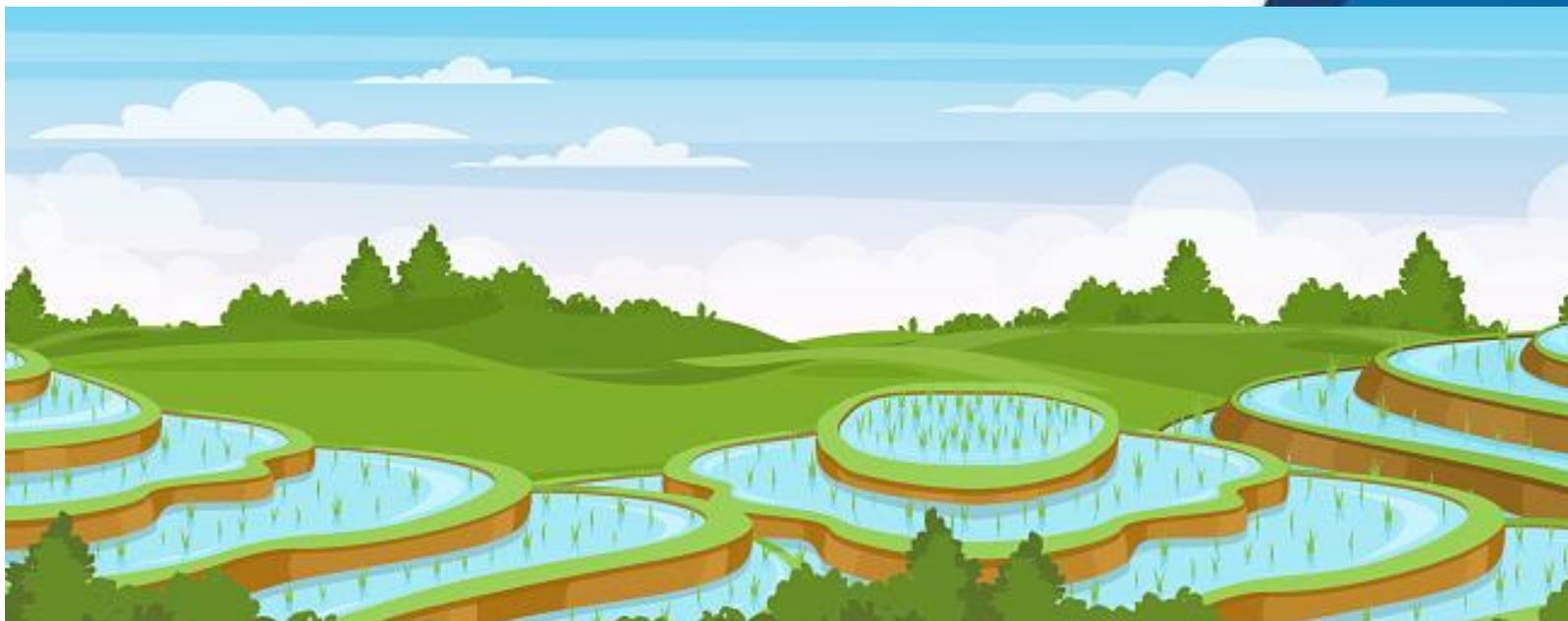
DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 1.	Capaian Kinerja Tahun 2024.....	VI
Grafik 2.	Produksi Kumulatif Pangan Strategis.....	27
Grafik 3.	Produksi Kumulatif Pangan Strategis.....	27
Grafik 4.	Indeks Pertanaman.....	35

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah selama kurun waktu satu tahun anggaran. LkjIP disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam laporan ini, dijelaskan pula pertanggungjawaban pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung tahun 2021-2026 sebagai implementasi dari pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana tahun 2021 – 2026.

RINGKASAN EKSEKUTIF

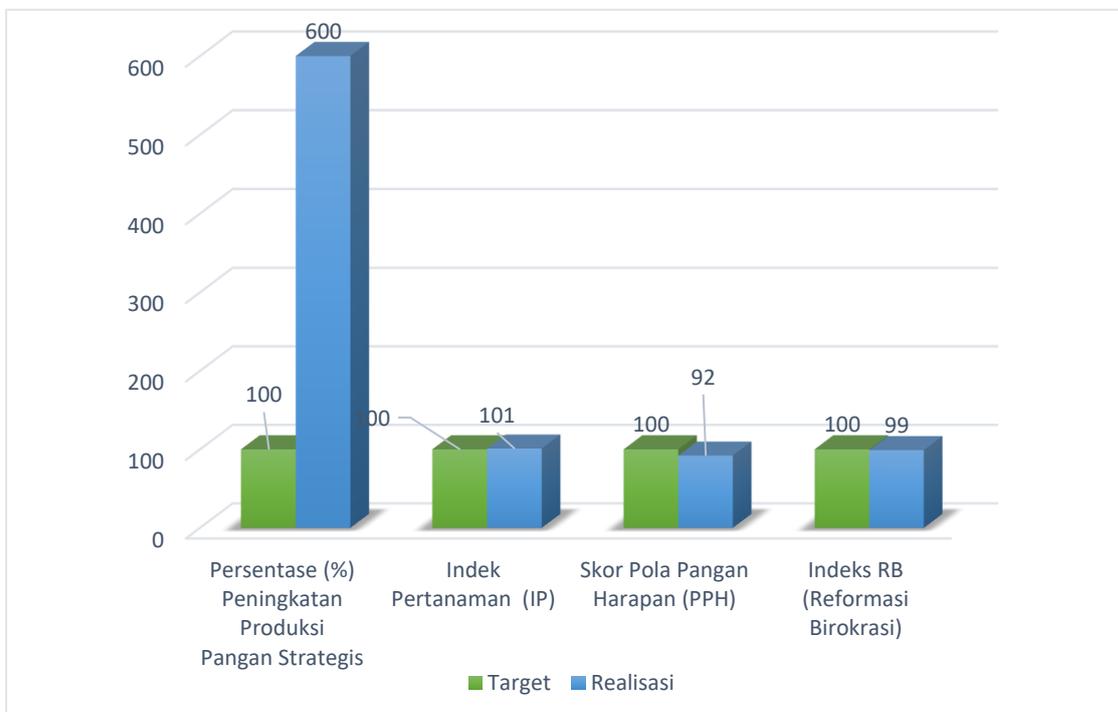


Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dalam kapasitasnya sebagai pelaksana teknis membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pertanian dan pangan dituntut mampu memberikan kontribusi atas pencapaian Visi, Misi, Sasaran dan Target Kinerja dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026, serta ikut bertanggungjawab mewujudkan Misi 8 yaitu Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam.

Secara umum capaian kinerja kinerja RJMD sudah tercapai sesuai terget sehingga sudah dilakukan revisi target. Begitu pula capaian kinerja atas sasaran dan target kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan menunjukkan kinerja yang baik. Dari 4 (Empat) Sasaran dan 4 (empat) indikator dengan capaian kinerja tahun 2024 rata-rata 223% , dan terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tidak tercapai 100% yakni karena perubahan cuaca yang ekstrem serta perbaikan saluran irigasi sangat berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja yang ditetapkan, alih fungsi lahan, ketersediaan air dan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.

Secara ringkas capaian kinerja tahun 2024 masing-masing indikator seperti diagram berikut :

CAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN 2024



Berdasarkan kategori capaian kinerja tersebut diatas, 4 (empat) indikator dalam kategori tinggi . Adapun alokasi anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai sasaran strategis sebesar Rp. 109.484.566.185,.

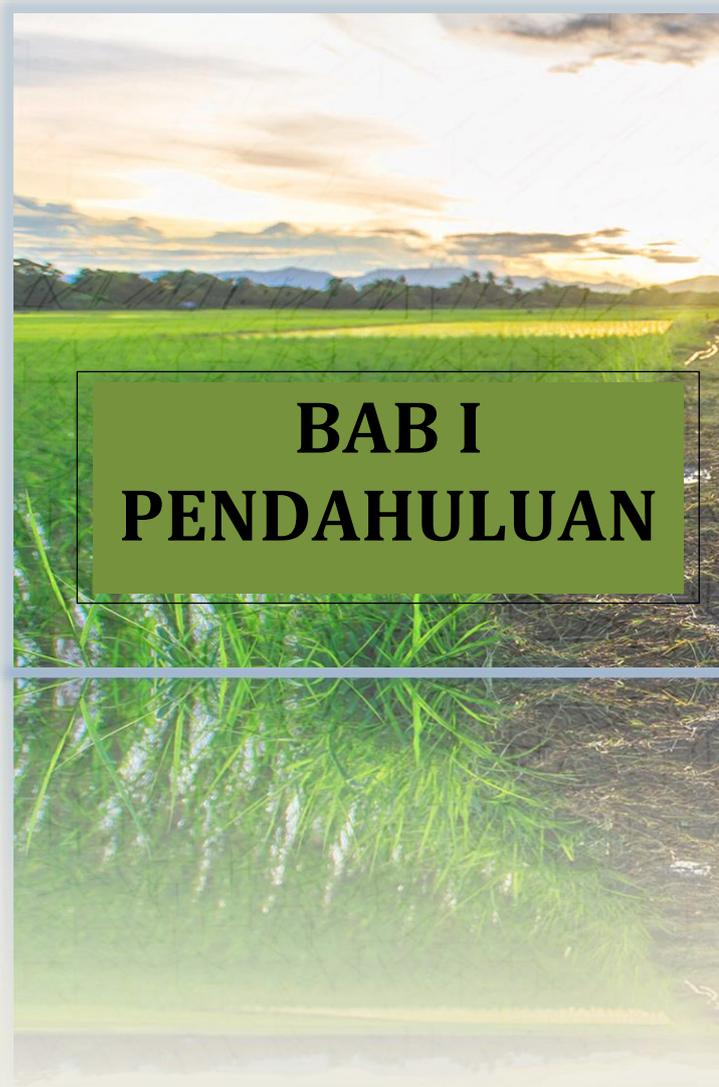
Upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja dan efektivitas program/kegiatan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga bisa dilakukan antisipasi apabila terjadi perubahan cuaca yang ekstrem maupun perbaikan saluran irigasi yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman.
2. Melakukan evaluasi dan revisi terhadap indikator sasaran serta target kinerja yang tertuang pada renstra untuk disesuaikan kembali terhadap perkembangan kebijakan di tingkat pusat
3. Mengembangkan inovasi guna mempercepat pencapaian target dan sasaran kinerja perangkat daerah

1.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas publik

merupakan landasan utama bagi proses penyelenggaraan pemerintahan hal Ini diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya.



Untuk menilai keberhasilan/kegagalan tersebut, maka pengukuran terhadap kinerja sangat penting untuk dilakukan. Dalam melakukan pengukuran kinerja diperlukan adanya indikator kinerja, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Berpijak pada konsep tersebut, maka indikator kinerja tidak saja dari aspek inputs, outputs, tapi juga sampai pada out comes, benefits dan impact dari kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Pada gilirannya semua proses yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian dan pangan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung mempunyai fungsi sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian dan pangan;

4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan pangan;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang pertanian dan pangan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

- a. Sub Bagian Umum Dan Keuangan
- b. Analis Kepegawaian Ahli Muda
- c. Perencana Ahli Muda

3. Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian

- a. Analis Prasarana Dan Sarana Pertanian Ahli Muda
- b. Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Ahli Muda
- c. Analis Prasarana Dan Sarana Pertanian Ahli Muda

4. Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura

- a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- c. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda

5. Bidang Perkebunan

- a. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
- b. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
- c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda

6. Bidang Peternakan

- a. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
- b. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
- c. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda

7. Bidang Kesehatan Hewan

- a. Medik Veteriner Ahli Muda
- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian

8. Bidang Pangan Dan Penyuluhan

- a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- c. Analis Kebijakan

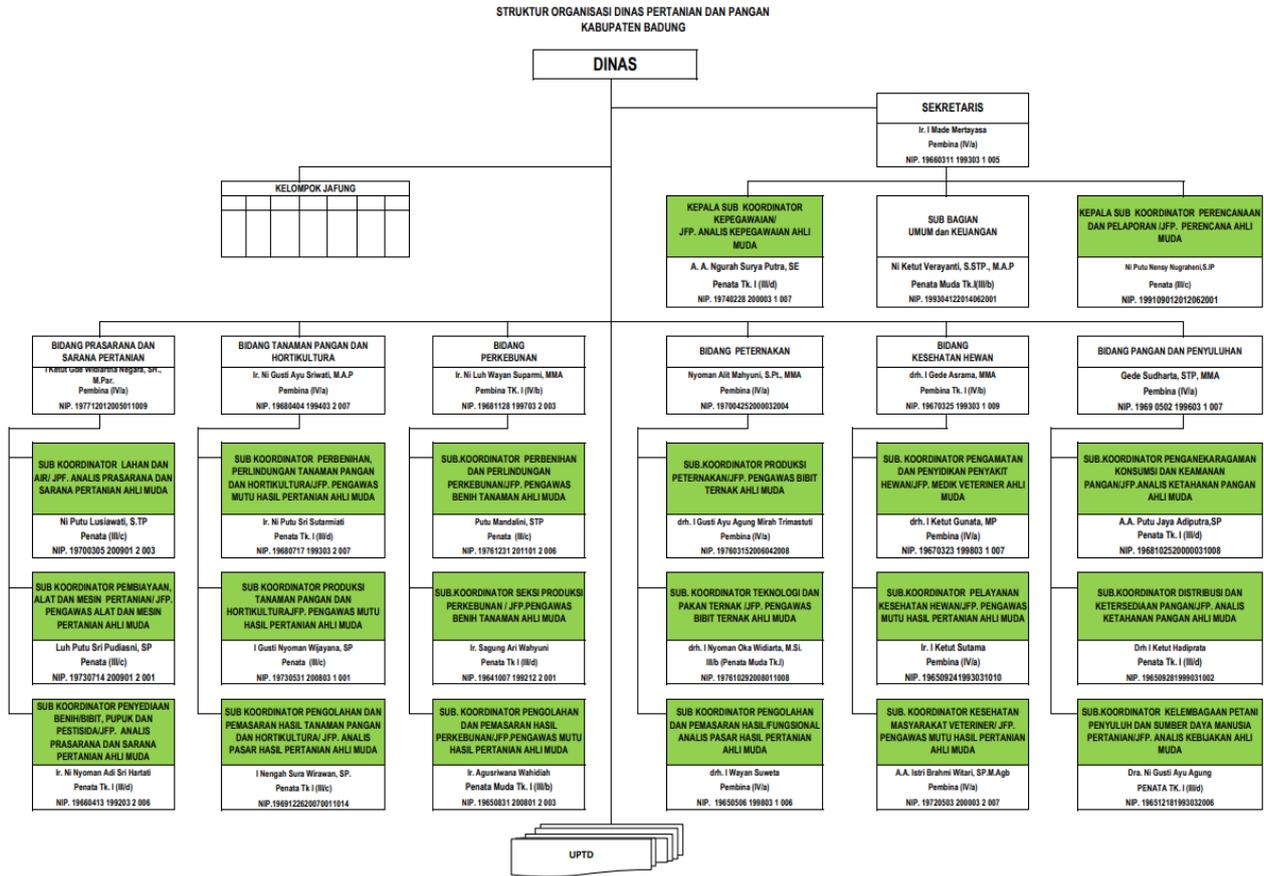
9. Unit Pelaksana Teknis Di 6 Kecamatan

- a. Kepala Uptd Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian
- b. Kepala Uptd Balai Benih Utama Padi, Palawija Dan Hortikultura
- c. Kepala Uptd Pusat Kesehatan Hewan Mengwi
- d. Kepala Uptd Pusat Kesehatan Hewan Petang
- e. Kepala Uptd Rumah Potong Hewan
- f. Kepala Uptd Pembibitan Tanaman Pertanian, Perkebunan, Hortikultura dan Arboretum

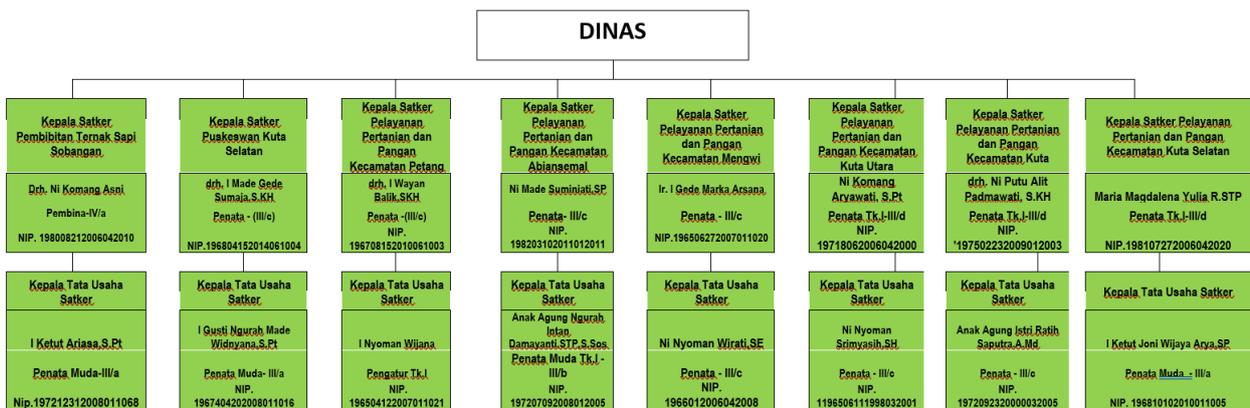
10. Satuan Kerja (SATKER)

- a. Satker Pembibitan Ternak Sapi Sobangan
- b. Satker Puskesmas Kuta Selatan
- c. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Petang
- d. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Abiansemal
- e. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Mengwi
- f. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Kuta Utara
- g. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Kuta
- h. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Kuta Selatan

Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan KabupatenBadung dapat dilihat dalam gambar berikut :



SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup akuntabilitas kinerja ini, pada dasarnya berupaya untuk menjawab sasaran RPJMD kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Petanian dan Pangan Kabupaten Badung. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, maka setiap perangkat daerah wajib mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sesuai instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Disamping itu, perlu pula memperhatikan:

- Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yaitu hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing SKPD serta memuat baik keberhasilan maupun kegagalan.
- Prinsip Prioritas, yaitu yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban SKPD yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.
- Prinsip Manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biayapenyusunannya dan bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

LKjIP mencerminkan kinerja instansi pemerintah selama satu tahun anggaran yang berbasis kinerja artinya pelaksanaan kegiatannya terukur, teruji dengan sasaran yang jelas.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sesuai Visi dan Misi Bupati Badung dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, maka pada Tahun Anggaran 2024 terdapat 4 Sasaran 4 indikator Kinerja yang ingin dicapai, dengan dukungan 9 Program, 25 Kegiatan serta 45 Sub Kegiatan dan telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja (Renja) 2024.

2.1.RENCANA STRATEGIS

Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali Program pembangunan bidang pertanian dan pangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sudah semestinya seiring, sejalan dan bersinergi dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah dicanangkan baik dalam skala daerah maupun dalam skala nasional, dimana dalam implementasi/ pelaksanaannya harus bersinergi dan terintegrasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Keberhasilan program pemerintah daerah adalah cerminan dari keberhasilan program pemerintah pusat.

Seirama dengan rencana strategis kementerian terkait, rencana strategis perangkat daerah 5 tahun ke depan bila ditarik benang merahnya, dapat dilihat dari visi dan misi renstra yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap kementerian dan provinsi sebagai berikut telaahan Renstra Kementerian Pertanian:

Visi Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024 :

”Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



Dalam Renstra Kementerian Pertanian 2020– 2024, Misi yang ditetapkan ada 3 yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.



Sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi tersebut adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Selain mendukung program strategis nasional, Dinas Pertanian dan Pangan juga mendukung program strategis sektoral yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali. Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Tahun 2018- 2024 adalah

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam mewujudkan Bali era baru”

Adapun Misi yang diemban Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali adalah :

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dalam jumlah dan kualitas memadai bagi kehidupan krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani.



Strategi yang dilaksanakan untuk mewujudkan misi tersebut adalah: Mempercepat peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani. Arah Kebijakan yang dilaksanakan antara lain :

1. Meningkatnya produksi pangan pokok
2. Meningkatnya produksi dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
3. Meningkatnya kapasitas SDM Pertanian Krama Bali
4. Meningkatnya Produktivitas Ternak
5. Meningkatnya kesehatan hewan secara berkelanjutan
6. Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung berusaha menyelaraskan Misi dan Sasaran yang dibuat oleh Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Bali meskipun dengan nomenklatur bahasa yang berbeda tetapi arti yang sama disesuaikan dengan target pencapaian Visi dan Misi Bapak Bupati – Wakil Bupati Badung terpilih Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian tujuan melalui perbaikan sistematika dan kebijakan di bidang pertanian dan pangan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pembangunan Bidang Pertanian dan Pangan di Kabupaten Badung yang diselaraskan dengan arah pembangunan dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maupun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung 2021-2026 digunakan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dalam pencapaian visi dan misi Bupati Badung serta tujuan organisasi. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung selalu memperhatikan keseimbangan pembangunan yang ada di Badung Selatan, Badung Tengah dan Badung Utara, sebagai satu kesatuan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik dan pemerintahan sehingga terwujud pembangunan yang terencana dan berkelanjutan dengan dilandasi falsafah *”Tri Hita Karana”*, khususnya dalam sub sektor Pertanian dan Pangan.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas, maka sesuai RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026 ,ditetapkan Visi Kabupaten Badung yaitu:

“MELANJUTKAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT BADUNG MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA ”



Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas serta memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan, maka ditetapkan 9 Misi (Misi 2021-2026) Kabupaten Badung. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dalam mewujudkan visi Kabupaten Badung mengacu dan mendukung **misi 8, yaitu :**

“Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam”

Mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang telah ditetapkan serta berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan Tujuan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Tujuan.

Adapun Tujuan dari Dinas Pertanian dan Pangan, yaitu :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat”

Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan dan menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun. Sasaran juga memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, teruji, dapat diukur dan dapat dicapai serta saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pertanian dan Pangan periode tahun 2016 – 2024 adalah sebanyak 4 (empat) Sasaran, yaitu :

- 1 Meningkatkan Produksi Pangan Strategis
- 2 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan
- 3 Meningkatkan Pola Konsumsi Pangan
- 4 Meningkatkan Pelayanan Bidang Pertanian

Adapun korelasi antara tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan:	Sasaran :
Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	<p>Meningkatnya Produksi Pangan Strategis</p> <p>Optimalisasi Pemanfaatan Lahan</p> <p>Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan</p> <p>Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian</p>

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	a. Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0,20 %
2.	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	a. Indek Pertanaman (IP)	2,084
3.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,99
4.	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	a. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24,97

2.3. RENCANA KINERJA

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung 2024 melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu : Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian. Besaran anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp109,484,566,185 yang terdiri dari :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan : Rp. 10.624.242.945
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian : Rp. 98.860.323.240

Adapun rinciannya Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target/Satuan	Program/Keg/Sub Keg	Anggaran Sebelum	Anggaran Sesudah
1	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0,20%	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp. 15.811.184.135	Rp. 19.649.106.918
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp. 14.853.427.577	Rp. 16.455.105.760
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rp. 6.125.248.927	Rp. 6.963.576.910
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp. 8.728.178.650	Rp. 9.491.528.850
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 254.845.360	Rp. 319.393.360
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Rp. 208.110.360	Rp. 272.658.360
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Rp. 46.735.000	Rp. 46.735.000
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 34.070.600	Rp. 34.070.600
				Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Rp. 34.070.600	Rp. 34.070.600
				Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Rp. 3.221.100	Rp. 3.221.100
				Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Rp. 3.221.100	Rp. 3.221.100

			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.781.500	Rp. 64.269.500
			Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Rp. 11.781.500	Rp. 64.269.500
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Rp. 653.837.998	Rp. 2.773.046.598
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Rp. 653.837.998	Rp. 2.773.046.598
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp. 22.154.042.439	Rp. 19.047.416.797
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 57.317.900	Rp. 57.317.900
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Rp. 57.317.900	Rp. 57.317.900
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp. 18.744.807.071	Rp. 15.899.941.489
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp. 17.136.545.791	Rp. 9.867.045.791
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Rp. 1.590.570.587	Rp. 1.624.705.005
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Rp. 0
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Rp. 17.690.693	Rp. 4.408.190.693
			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.351.917.468	Rp. 3.090.157.408

				Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Rp. 3.351.917.468	Rp. 3.090.157.408
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp. 3.904.690.396	Rp. 3.904.568.756
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.352.938.130	Rp. 3.352.816.490
				Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.352.938.130	Rp. 3.352.816.490
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 414.263.800	Rp. 414.263.800
				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp. 414.263.800	Rp. 414.263.800
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 137.488.466	Rp. 137.488.466
				Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Rp. 53.314.306	Rp. 53.314.306
				Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 84.174.160	Rp. 84.174.160
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp. 2.231.364.160	Rp. 2.133.555.040
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp. 2.231.364.160	Rp. 2.133.555.040
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp. 718.950.812	Rp. 621.141.692
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp. 1.512.413.348	Rp. 1.512.413.348
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp. 1.885.589.170	Rp. 1.681.781.890
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp. 1.885.589.170	Rp. 1.681.781.890
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Rp. 1.688.703.170	Rp. 1.484.895.890

				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp. 29.723.500	Rp. 29.723.500
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Rp. 67.162.500	Rp. 67.162.500
				Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
2	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	Indeks Pertanian (IP)	2,13	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp. 8.344.375.215	Rp. 8.629.044.576
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp. 8.344.375.215	Rp. 8.629.044.576
				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp. 5.651.427.204	Rp. 5.872.025.248
				Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Rp. 2.692.948.011	Rp. 2.757.019.328
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	95,99	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp. 8.344.375.215	Rp. 8.629.044.576
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp. 8.349.590.415	Rp. 8.645.959.776
				Pemantauan Stok Pangan	Rp. 5.215.200	Rp. 16.915.200
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp. 1.219.195.136	Rp. 1.881.431.485
				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Rp. 78.414.800	Rp. 0
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp. 1.140.780.336	Rp. 1.881.431.485
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp. 2.248.200	Rp. 2.248.200
				Penyusunan Peta Kerentanan dan	Rp. 2.248.200	Rp. 2.248.200

				Ketahanan Pangan Kecamatan		
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Rp. 2.248.200	Rp. 2.248.200
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp. 98.812.484	Rp. 94.603.484
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 98.812.484	Rp. 94.603.484
				Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 98.812.484	Rp. 94.603.484
4	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24,97	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 57.727.467.282	Rp. 52.443.893.839
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.125.793.869	Rp. 1.908.470.618
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 7.258.000	Rp. 104.553.000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.118.535.869	Rp. 1.803.917.618
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 47.858.013.568	Rp. 40.696.751.629
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 47.858.013.568	Rp. 40.696.751.629
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 61.822.239	Rp. 61.822.239
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 47.082.870	Rp. 47.082.870
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp. 14.739.369	Rp. 14.739.369
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 3.167.333.166	Rp. 3.403.555.062
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 85.000.000	Rp. 85.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 1.523.678.086	Rp. 1.711.299.832
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 315.741.276	Rp. 441.836.166
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 1.114.128.718	Rp. 1.036.633.978
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 52.566.714	Rp. 52.566.714
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 76.218.372	Rp. 76.218.372
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 967.853.400	Rp. 1.199.587.434

			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 967.853.400	Rp. 1.199.587.434
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.840.395.020	Rp. 3.117.708.500
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 531.636.000	Rp. 808.949.480
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 2.296.759.020	Rp. 2.296.759.020
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.706.256.020	Rp. 2.055.998.357
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 1.221.656.020	Rp. 1.288.256.020
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 327.400.000	Rp. 327.400.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 157.200.000	Rp. 440.342.337

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja direalisasikan dengan Penetapan kinerja yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang akan menerima tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan tanggungjawab/kinerja seperti pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4.

Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1.	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	a. Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0,20 %	0,20 %
2.	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	a. Indek Pertanaman (IP)	2,084	2,13
3.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,99	95,99
4.	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	a. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24,97	24,97

Program kerja oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung pada tahun 2024 dalam rangka memberikan kontribusi terhadap tercapainya kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	
		Induk	Perubahan
1.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 9.568.785.551	Rp. 10.527.391.261
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 2.248.200	Rp. 2.248.200
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 98.812.484	Rp. 94.603.484
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 57.727.467.282	Rp. 52.443.893.839

5.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 15.811.184.135	Rp. 19.649.106.918
6.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 22.154.042.439	Rp19.047.416.797
7.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 3.904.690.396	Rp. 3.904.568.755
8.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 2.231.364.160	Rp. 2.133.555.040
9.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 1.885.589.170	Rp. 1.681.781.890
	Total	Rp. 113.384.183.817	Rp. 109.484.566.185

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data - data kinerja yang lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu : (1) Data internal, berasal dari sistem informasi perangkat daerah, dan (2) Data eksternal, berasal dari luar Instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efektivitas dan efisien.

Pengukuran Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, diperoleh hasil kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dengan rincian seperti pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0,20 %	0,61%	300%
2	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	Indek Pertanaman (IP) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	2,13	2,02	94,83%
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,99	91,85	95,69%
4	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24,97	24,94	99,91%

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yang penilaiannya dilakukan secara mandiri oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara realisasi atau kinerja nyata dengan yang direncanakan (target sasaran).

Dalam analisis ini juga akan diuraikan hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan serta langkah antisipasi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali

Sesuai misi pertama yang tertuang pada Renstra Kementerian Pertanian Visi Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024 yakni **terwujudnya ketahanan pangan** dengan sasaran meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, serta sesuai dengan misi yang tertuang pada Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Tahun 2018- 2024 yakni, **memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dalam jumlah dan kualitas memadai bagi kehidupan krama Bali** memiliki korelasi dengan pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung yang dituangkan dalam perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024 pada sasaran 1 yakni **meningkatnya produksi pangan strategis Kabupaten Badung**. Secara garis besar peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.2.1

Capaian peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri

KOMODITI	CAPAIAN TH 2023			CAPAIAN TH 2024		
	NASIONAL	BALI	BADUNG	NASIONAL	BALI	BADUNG
BERAS	32.074.045	379.870	63.649	30.620.000	365.424	67.254,87
KOPI	794.800	15.600	460	789.233	17.800	466,70
TELOR (Ayam Petelur)	6.117.905	227.936	2.702	6.342.705	224.601	2.687,76
DAGING	4.264.496.	100.601	52.131	4.414.769.	98.478	73.509,42
TOTAL	43.251.246	724.007	118.942	42.166.707	706.303	143.918,75

Sumber : <https://webapi.bps.go.id/>

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa , Kabupaten Badung berkontribusi terhadap prosentase peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri sebesar 0,33% atau sebanyak 143.918,75 Ton dari capaian Nasional yakni 42.166.707 Ton. Peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri di Tahun 2024 diwujudkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan melaksanakan berbagai strategi seperti penetapan lahan sawah yang dilindungi atau pengendalian alih fungsi lahan sawah, diversifikasi budidaya, menyusun neraca pangan strategis dan serta pemeliharaan jaringan irigasi.

3.2.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG

Sasaran 1 : Meningkatnya produksi pangan strategis untuk

mengukur sasaran ini digunakan 1 indikator kinerja utama : Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Produksi Pangan strategis	a.	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0,20 %	1,2%	600%

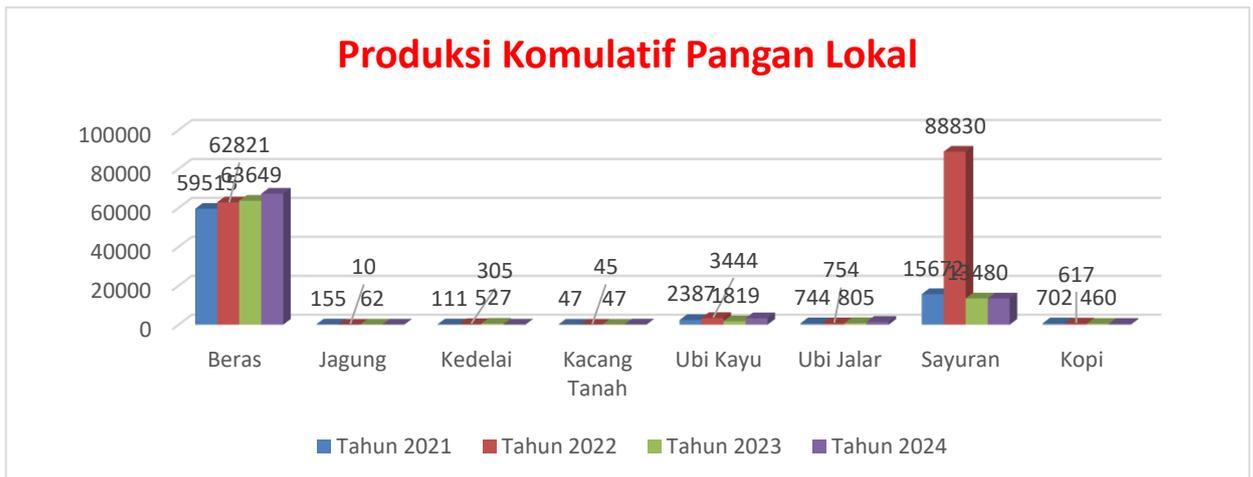
Target presentase (%) peningkatan produksi pangan strategis Tahun 2024 adalah 0,20% dan terealisasi sebesar 0,61 % dengan presentase 600%. Produksi kumulatif pangan strategis Tahun 2024 adalah sebesar 143.918,75 Ton. Yang termasuk dalam produksi pangan strategis ialah Beras, Daging, Kopi dan Telur Sedangkan untuk perbandingan presentase peningkatan produksi pangan kumulatif tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2.1
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1

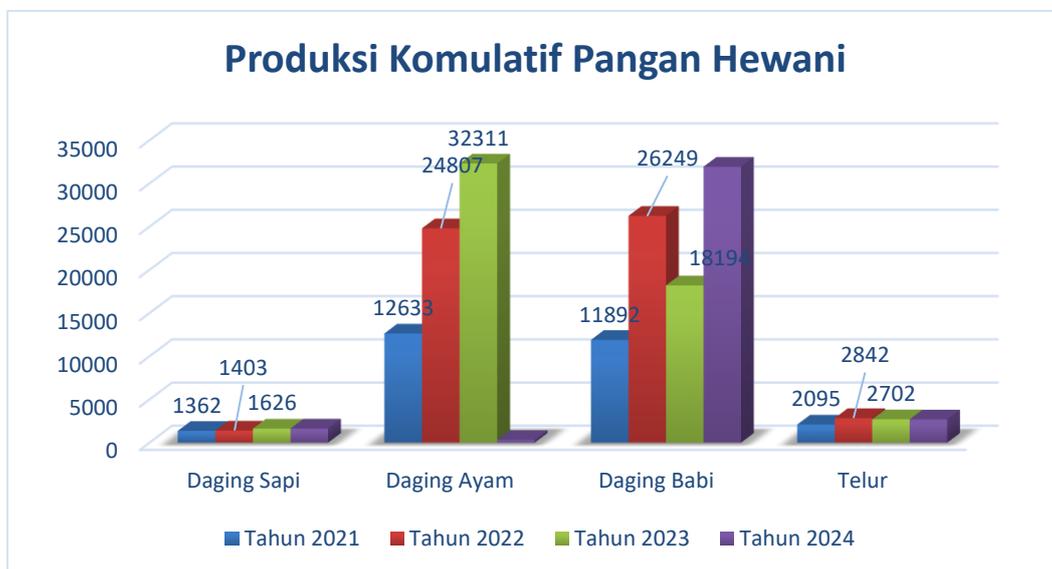
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2023
1	Meningkatnya Produksi Pangan strategis	a.	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0,16 %	0,17%	1,2%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan produksi pangan strategis di Tahun 2024 mencapai 143.918,75 Ton. , dimana pada Tahun 2023 produksi pangan strategis (beras,kopi, daging dan telur) mencapai 118.942 Ton.

Rekapitulasi produksi komulatif pangan (tanaman pangan) lokal dapat dilihat pada diagram berikut :



Rekapitulasi produksi komulatif pangan strategis (daging dan telur) dapat dilihat pada diagram berikut :



Terjadi penurunan terhadap produksi pangan strategis khususnya produksi kopi, daging babi dan telur. Terlihat pada diagram diatas bahwa pada Tahun 2024 total produksi kopi sebanyak 466,7 Ton , daging adalah sebanyak **73.509,42** Ton dan produksi telur di Kabupaten Badung mencapai **2.687,76** Ton sedangkan terjadi peningkatan jumlah komoditas strategis yang dikembangkan yaitu sebesar 1,2% atau sebesar 143.918,75 Ton

Penurunan Produksi Pangan Daging dan Telur di Kabupaten Badung disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (BERAS DAN TELUR TIDAK TERCAPAI)

1. Musim panca roba yang mengganggu musim tanam dan sangat berpengaruh terhadap produksi pangan 2024.
2. Menurunnya kualitas dan debit air
3. Menurunnya tingkat kesuburan tanah yang berpengaruh terhadap produktivitas tanaman
4. Menurunnya produksi telur disebabkan oleh meningkatnya harga bahan baku pakan terutama jagung sehingga terjadi penurunan populasi ayam petelur

Meskipun terdapat permasalahan diatas, tetapi kondisi ketersediaan pangan strategis secara kumulatif di Kabupaten Badung mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena strategi Dinas Pertanian dan Pangan dengan merancang berbagai macam program kegiatan guna mengantisipasi kemungkinan terburuk terhadap perubahan iklim secara global yang terjadi , antara lain :

1. Menghimbau kepada petani untuk mempercepat masa tanam agar dapat memanfaatkan air secara efektif dan efisien.
2. Penerapan pola tanam dengan pergiliran komoditas serta pemilihan varietas benih tanaman yang tidak membutuhkan banyak air dan tahan hama.
3. Melakukan perbaikan dan perawatan jaringan irigasi untuk mencegah terjadinya kebocoran air
4. Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang LP2B dan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
5. Meningkatkan kesuburan tanah melalui upaya pergiliran komoditas, pemanfaatan pupuk organik dan pengadaan pembenah tanah.
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan melalui komunikasi informasi dan edukasi (KIE) , memperluas cakupan vaksinasi , meningkatkan pelayanan kepada kelompok ternak

7. Meningkatkan populasi ternak yang berkualitas melalui kegiatan pengadaan bibit ternak dan meningkatkan pelayanan inseminasi buatan
8. Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui kegiatan:
 - Demplot Cabai rawit seluas 45 Ha di Kecamatan Mengwi, Abiansemal
 - Demplot Bawang merah seluas 10 Ha yang dilaksanakan di Kecamatan Mengwi
 - Demplot Cabai Besar seluas 2 Ha yang dilaksanakan di Kecamatan Petang
 - Demplot Jagung seluas 10 Ha di Kecamatan Mengwi
 - Demplot Asparagus seluas 9 Ha di Kelompok Kecamatan Petang



Kegiatan demplot ini terus dikembangkan, sejalan dengan program pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya inflasi. Selain itu kegiatan demplot ini memiliki pengaruh besar bagi perkembangan teknologi pertanian di Kabupaten Badung.



Demplot merupakan suatu metode penyuluhan pertanian kepada petani dengan cara membuat lahan percontohan, agar petani bisa melihat dan membuktikan pengaruh sesuatu terhadap tanaman. Melalui kegiatan demplot, petani dapat langsung melihat dan mempraktikkan inovasi teknologi budidaya, varietas unggul baru, pemupukan dan lain-lain yang dianjurkan sehingga diharapkan menambah pengetahuan, perubahan sikap dan keterampilan petani dalam pelaksanaan budidaya yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas.

9. Pelaksanaan Gertam (Gerakan Tanam) Bawang Merah di Subak Munggu Desa Munggu Kecamatan Mengwi. Gerakan tanam ini merupakan program jangka pendek dan menengah dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dalam upaya pengendalian mitigasi dampak inflasi.



10. Adanya pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman perkebunan seperti:

- Demplot vanili di Kecamatan Petang
- Intensifikasi dan peremajaan kopi di Kecamatan Petang
- Diversifikasi tanaman kelapa di Kecamatan Petang, Abiansemal dan Mengwi

11. Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui Pembentukan Unit Reaksi Cepat

Mengingat dampak buruk organisme pengganggu tumbuhan tidak hanya berdampak bagi penurunan angka produksi pertanian, kerugian yang dialami petani tetapi juga secara lebih luas dapat mengakibatkan kerawanan pangan maka pada tahun 2024, Dinas Pertanian dan Pangan mengambil langkah cepat dengan membentuk Unit Reaksi Cepat Tim Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kabupaten Badung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani, sehingga serangan hama penyakit tanaman dapat tertangani dengan cepat dan tuntas.

Tidak hanya itu, dalam mendukung fungsi dan tugas Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) melalui Unit Reaksi Cepat juga didukung dengan sarana seperti Mobil URC , Drone Pertanian dan Obat-obatan.

Mobil URC dan drone pertanian ini merupakan pengadaan Tahun 2024 yang bertujuan tidak hanya mempercepat proses pengendalian hama dan penyakit tumbuhan tetapi sekaligus memberikan pengenalan kepada petani terhadap penerapan teknologi pertanian multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas pertanian seperti penyemaian, penyebaran pupuk sehingga dapat menghasilkan produk pertanian secara lebih efektif dan efisien.



12. Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian

Tahun 2024 pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pertanian dan Pangan berkomitmen melakukan perbaikan terhadap beberapa infrastruktur dan sarana pengembangan pertanian berupa bantuan maupun subsidi. Bantuan prasarana pertanian yang diberikan Tahun 2024 yakni sebanyak 11 (tujuh) unit yang bersumber dari APBN dan APBD. Bantuan tersebut berupa Jaringan Irigasi Tersier sebanyak 4 unit yang bersumber dari APBN dan 7 unit jalan usaha tani yang dananya bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut :

- Jalan Usaha Tani di Subak Delod Sema
- Jalan Usaha Tani di Subak Sempidi
- Jalan Usaha Tani di Subak Uma Desa
- Jalan Usaha Tani di Subak Lukluk
- Jalan Usaha Tani di Subak Teba
- Jalan Usaha Tani di Subak Tinjak Menjangan
- Jalan Usaha Tani di Subak Uma Tegal
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
di Subak Karang Dalem, Subak Taman dan Subak Mungkagan



Pemberian bantuan sarana pertanian yang dilaksanakan selama Tahun 2024 berupa penyerahan benih/bibit , subsidi benih dan asuransi serta penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian. Total sarana berupa alat dan mesin pertanian yang dananya digelontorkan dari APBD Kabupaten Badung adalah sebanyak 151 Unit, berupa :

1. 35 unit Traktor Roda Dua
2. 45 unit handsprayer
3. 62 unit cultivator
4. 10 unit Combine Harvester



Adapun bantuan bibit pohon sampai dengan tahun 2024 yang telah disalurkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan sebanyak pohon 105.200 bibit adalah sebagai berikut :

- Alpukat sebanyak 3.250 pohon
- Kelapa genjah 5000 pohon
- Manggis 200 pohon
- Mangga 5.250 pohon
- Durian 6.600 pohon
- Tanaman bunga sebanyak 1.500 pohon
- Hortikultura sebanyak 9000 pohon

13. Masyarakat Tanam Cabe

selain mengembangkan tanaman cabai rawit di kawasan/ areal sawah , guna mengantisipasi dampak inflasi khususnya gejolak harga cabai dan dampak perubahan iklim global serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, Dinas Pertanian dan pangan turut melaksanakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan dengan memberikan bibit cabai kepada masyarakat dan sarana pengembangannya serta sosialisasi teknik budidaya cabai di lahan pekarangan.



Awal peluncuran program Matanabe merupakan program CSR kerjasama Dinas Pertanian dan Pangan Badung dengan Bank BPD Bali, dalam rangka menjaga ketahanan pangan keluarga di tengah pandemi Covid-19, tetapi di Tahun 2024 dana kegiatan ini murni bersumber dari APBD Kabupaten Badung. Tahun 2024 kegiatan Matanabe dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi sasaran yaitu :

1. TP PKK Banjar Wanagiri, Ungasan, Kec. Kuta Selatan
2. TP PKK Lingkungan Permata Benoa, Kec. Kuta Selatan
3. TP PKK Lingkungan Banjar Babakan, Kerobokan Kaja, Kec Kuta Utara

Masing-Masing Kelompok PKK mendapatkan 1000 bibit cabai dengan asumsi perAnggota menerima Bibit Sejumlah **10-14 Pohon** dengan Anggaran **Rp.213.348.400**

14. Siswa Belajar Bertani (SIBERTANI)

Salah satu strategi menarik minat para petani muda ialah mengenalkan teknik budidaya pertanian pada siswa-siswi sekolah. Dengan menumbuhkan minat budidaya pertanian pada siswa-siswi , diharapkan akan semakin bertambahnya jumlah petani muda di Kabupaten Badung yang tentunya berdampak pada penambahan tenaga kerja dan produksi pertanian.

Tahun 2024 , sibertani ini didanai dari APBD Kabupaten Badung dan dilaksanakan di 6 (enam) sekolah dengan total bantuan 3000 bibit cabai dalam polybag yaitu :

- SMP N 3 Kuta Selatan Kecamatan Kuta Selatan
- SD N Taman Rama Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan
- SD N 3 Ungasan Kecamatan Kuta Selatan
- SD N 4 Benoa Kecamatan Kuta Selatan
- SD N 5 Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan
- SD N 6 Benoa Kecamatan Kuta Selatan

Masing-Masing Menerima Bibit Cabai Dalam Media Polybag Sejumlah **500 Pohon** Dengan Anggaran **Rp. 169.534.450,00**



15. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Petani melalui Pelatihan

Pada tahun 2024, Dinas Pertanian dan Pangan memberikan pelatihan kepada pekaseh subak terkait pelatihan pengoperasian alat mesin pertanian, pelatihan pengendalian hama dan penyakit tanaman



16. Pelaksanaan Kegiatan Survei Ubinan dan Rapat Subron

Kegiatan Ubinan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang produksi pada tanaman pangan yang akurat dan menggambarkan kondisi luas lahan dan indeks pertanaman terkini dengan cara menimbang hasil (kg/ubinan) dan dilakukan wawancara dengan penggarap atau pemilik lahan untuk mengumpulkan data valid yang berkaitan dengan produktivitas. Setelah mendapatkan data ubinan kemudian data tersebut akan dibahas dalam rapat rutin subron, guna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman pangan di Kabupaten Badung. Kegiatan ini sangat penting dilakukan guna mengambil kebijakan terkait pengembangan tanaman pangan selanjutnya, sehingga dapat meningkatkan indeks pertanaman.

Strategi di Bidang peternakan dan kesehatan hewan juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi daging dan telur yakni :

1. Adanya pelaksanaan kegiatan pelatihan terkait inseminasi buatan khusus ternak sapi dan babi
2. Pengawasan peredaran pakan ternak (pengiriman sampel pakan ternak)

3. Kegiatan vaksinasi PMK bagi hewan ternak

Kegiatan vaksinasi kepada hewan ternak ini menyangkut hewan ternak tidak hanya sapi melainkan ternak babi. Vaksinasi pada ternak sapi dan babi penting untuk dilakukan karena merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan yang rentan PMK.



4. Vaksinasi SE untuk sapi

5. Melakukan spraying dikandang/tempat pemeliharaan babi, ayam, dan sapi

6. Kegiatan ante dan post mortem hewan/ternak dalam rangka keamanan Bahan Asal Hewan untuk dapat menjaga mutu dan kualitas daging /ASUH (aman, sehat utuh dan halal)



7. Kegiatan penerapan hygiene sanitasi usaha produk hewan dalam rangka penerbitan rekomendasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner)

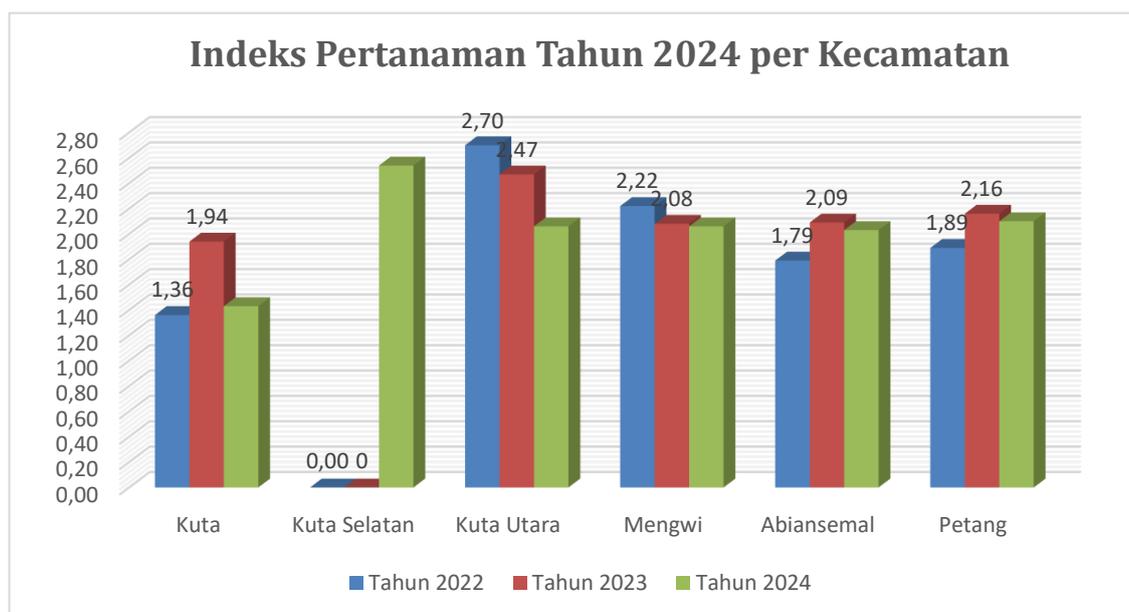
Sasaran 2 : Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Untuk mengukur sasaran ini digunakan 1 indikator kinerja utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
2	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	Indek Pertanaman (IP)	2,084	2,10	100,7%

Optimalisasi lahan pertanian merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usahatani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dapat diukur melalui indeks pertanaman. **Indeks Pertanaman (IP)** merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah luas pertanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang ada untuk ditanami.

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Indikator Kinerja Indeks Pertanaman Tahun 2024 adalah sebesar 2,10 dari target 2,084 atau terealisasi sebesar 100,7 %.

Indeks Pertanaman Kabupaten Badung per Kecamatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Diagram dibawah ini :



Dari diagram diatas bahwa, dari 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Utara memiliki indeks pertanaman tertinggi di Tahun 2024 dan Kecamatan Kuta Selatan merupakan kecamatan yang tidak memiliki indeks pertanaman, karena tidak terdapat lahan pertanian di wilayah tersebut. Terjadi penurunan angka indeks pertanaman di Kecamatan Kuta dan Kuta Utara. Ini salah satunya disebabkan karena terjadinya alih fungsi lahan pertanian di wilayah tersebut.

Tabel 3.2.2

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 setiap Tahun

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Indek Pertanaman (IP)	2,22	2,13	2,10

Turunnya indeks pertanaman Tahun 2024 disebabkan beberapa faktor yaitu :

1. Terjadinya El nino yang mengakibatkan musim kemarau berkepanjangan sehingga mengganggu musim tanam dan sangat berpengaruh terhadap produksi pangan 2024.
2. Maraknya alih fungsi lahan persawahan menjadi non persawahan seperti perumahan, vila, hotel dan restoran.
3. Perbaikan jaringan irigasi yang mengakibatkan tertundanya masa tanam
4. Menurunnya kualitas dan debit air.
5. Menurunnya tingkat kesuburan tanah yang berpengaruh terhadap produktivitas tanaman.
6. Banyaknya lahan sawah dengan status bera atau tidak dimanfaatkan karena tingginya biaya produksi untuk beralih komoditas

Untuk mencapai IP yang maksimal perlu memperhatikan beberapa aspek antara lain sosial budaya, ketersediaan air, ketersediaan alsintan, jenis komoditas, dan ketersediaan modal-sarana produksi, tersedia tenaga kerja pada saat tanam dan panen, serta sarana pertanian untuk mengolah tanah, sehingga setiap kegiatan pengolahan lahan dapat diselesaikan lebih cepat.

Meskipun terjadi penurunan IP, tetapi pada tahun 2024 Dinas Pertanian dan Pangan tetap dapat melampaui target IP. Ini disebabkan karena berbagai upaya yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan untuk meningkatkan indeks pertanaman di Tahun 2024, antara lain:

1. Memberikan sosialisasi kepada petani Subak terkait optimalisasi penggunaan lahan pertanian dengan pola tanam sesuai komoditas. Pola tanam merupakan usaha penanaman pada sebidang lahan dengan mengatur susunan tata letak dan urutan tanaman selama periode waktu tertentu termasuk masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertentu. Sehingga kegiatan ini dapat secara efektif meningkatkan kesuburan tanah (optimalisasi lahan)
2. Melakukan pendampingan oleh penyuluh pertanian dalam hal pengaturan masa tanam agar lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
3. Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian

Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian sangat berpengaruh terhadap indeks pertanaman melalui kegiatan pemberian bantuan subsidi benih, bantuan alat dan mesin pertanian, perlindungan asuransi, bantuan pupuk dan pestisida, pengendalian hama dan penyakit, serta perawatan jaringan irigasi.



Sasaran 3 : Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan. Untuk mengukur sasaran ini digunakan 1 indikator kinerja utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,99	92,23	96,8%

Skor Pola Pangan Harapan merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik di tingkat konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk.

Berdasarkan data survei skor PPH secara mandiri dan bekerjasama dengan akademisi, maka didapatkan perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Badung mengalami penurunan. Pada Tahun 2023 Skor PPH Kabupaten Badung Sebesar 95,97 dan Pada Tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 92,23, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1
Analisa Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Makanan Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2024

		Berat (gram)	Energi	Protein	%AKE	Skor Aktual	Bobot	Skor Maks	Skor AKE	Skor PPH
		Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean
Kelompok Pangan	Padi-padian	375,92	1425,06	32,36	67,86	30,30	,50	25,00	33,93	25,00
	Umbi-umbian	38,13	39,36	,48	1,87	,84	,50	2,50	,94	,94
	Pangan Hewani	146,99	354,86	29,04	16,90	30,19	2,00	24,00	33,80	24,00
	Minyak dan Lemak	22,77	204,92	,01	9,76	4,36	,50	5,00	4,88	4,88
	Buah/Biji Berminyak	1,07	6,18	,12	,29	,13	,50	1,00	,15	,15
	Kacang-kacangan	24,87	65,75	6,21	3,13	5,59	2,00	10,00	6,26	6,26
	Gula	11,23	42,32	,06	2,02	,90	,50	2,50	1,01	1,01
	Sayur dan Buah	272,97	147,24	4,23	7,01	31,31	5,00	30,00	35,06	30,00
	Lain-lain	144,00	65,54	1,79	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Bali (2024)

Penurunan disebabkan karena adanya erubahan sistem survei, di tahun sebelumnya metode surveliance adalah dengan menjalin kerjasama dengan Poltkes kemenkes Denpasar, 2019 dengan menggunakan indikator penilaian yang berbeda dengan survailance yang dilaksanakan oleh susenas.

Dapat dilihat pada capaian skor pola pangan harapan dari Tahun 2022,2023 dan tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 setiap Tahun

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,2	95,97	92,23

Capaian skor pola pangan harapan Kabupaten Badung merupakan akumulasi upaya Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan program kegiatan yang efektif untuk mendukung peningkatan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Badung seperti :

1. Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal

Setiap tahun Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung melaksanakan pelatihan pengolahan pangan lokal bagi Kelompok Wanita Tani yang bertujuan untuk mendorong penganekaragaman konsumsi pangan lokal rumah tangga. Pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, pisang, sukun, labu kuning dikembangkan menjadi tepung. Kedepan diharapkan aneka tepung ini dapat diolah sebagai pangan pokok pengganti beras.



2. Gerakan Pangan Murah

Guna menjaga ketersediaan bahan pangan pokok dan daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan menjelang Hari Besar Keagamaan maka pada Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah bersumber dari APBN dan APBD. Pelaksanaan GPM Kabupaten Badung menggandeng Perum BULOG dan Gapoktan, serta pelaku usaha setempat lainnya menyediakan berbagai kebutuhan pangan pokok untuk dijual dengan harga terjangkau atau di bawah harga pasar. Sejumlah komoditas tersebut meliputi, beras, telur ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, daging sapi, gula, minyak goreng, serta aneka sayuran dan buah-buahan



3. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan



Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengukur dan memitigasi kerawanan pangan di Kabupaten Badung. Ketersediaan FSVA dan juga Skor PPH merupakan bagian dari upaya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dalam melakukan inovasi dan transformasi penyediaan data dan informasi. Hasil FSVA dan capaian Skor PPH kepada seluruh pihak serta stakeholders pangan terkait, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan dalam upaya membangun sistem pangan nasional yang adaptif, tangguh dan berkelanjutan.

Sasaran 4 : Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian. Untuk mengukur sasaran ini digunakan 1 indikator kinerja utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
4	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	Indeks RB	24,96	24,94	99,91 %

Mulai Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Badung tidak lagi melaksanakan evaluasi mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bagi perangkat daerah, sehingga capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 tidak bisa direalisasikan dan masih menggunakan indeks RB Tahun 2022 yaitu 24,94 dari target capaian nilai 24,96 (Tercapai 99,91%) dengan hasil sebagai berikut :

- a. Aspek pemenuhan memperoleh nilai 9,66% dari bobot yang ditetapkan 14,60%
- b. Aspek reform memperoleh nilai 15,28% dari bobot yang ditetapkan sebesar 21,70%

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rangka pelaksanaan pelaporan kinerja tahun berikutnya kami akan mengusulkan dilakukannya revisi terhadap indikator sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026.

Untuk dapat memenuhi target yang diharapkan perlu disusun program yang efektif untuk mendukung peningkatan indeks reformasi birokrasi , salah satunya dengan mendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan berbasis elektronik secara lebih efektif di Tahun berikutnya, upaya tersebut sudah dilakukan, dengan merancang sistem “aplikasi Bang Goni”bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Badung dan merancang sistem aplikasi “Sampi Digital” Badung Go Tani na dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udavana.



3.3 Aspek Keuangan

Untuk Merealisasikan dan mencapai target-target sasaran melalui pencapaian target indikator kinerja utama menggunakan dana dengan gambaran sebagai berikut :

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Penjelasan
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10.624.242.945	8.044.741.210	75,72	
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10.624.242.945	8.044.741.210	75,72	
2.09	3.27.2.09.0.00.10.0000		Dinas Pertanian dan Pangan	10.624.242.945	8.044.741.210	75,72	
2.09	3.27.2.09.0.00.10.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	10.527.391.261	7.960.347.210	75,62	
2.09	3.27.2.09.0.00.10.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	8.645.959.776	6.804.393.710	78,7	
2.09	3.27.2.09.0.00.10.0000	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5.872.025.248	4.598.521.210	78,31	
2.09	3.27.2.09.0.00.10.0000	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	16.915.200	4.580.500	27,08	
2.09	3.27.2.09.0.00.10.0000	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	2.757.019.328	2.201.292.000	79,84	
2.09	3.27.2.09.0.00.10.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.881.431.485	1.155.953.500	61,44	
2.09	3.27.2.09.0.00.10.0000	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.881.431.485	1.155.953.500	61,44	
2.09	3.27.2.09.0.00.10.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.248.200	617.000	27,44	
2.09	3.27.2.09.0.00.10.0000	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.248.200	617.000	27,44	
2.09	3.27.2.09.0.00.10.0000	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2.248.200	617.000	27,44	
2.09	3.27.2.09.0.00.10.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	94.603.484	83.777.000	88,56	
2.09	3.27.2.09.0.00.10.0000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	94.603.484	83.777.000	88,56	
2.09	3.27.2.09.0.00.10.0000	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	94.603.484	83.777.000	88,56	

3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	98.860.323.240	72.765.276.260	73,6	
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	98.860.323.240	72.765.276.260	73,6	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000		Dinas Pertanian dan Pangan	98.860.323.240	72.765.276.260	73,6	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52.443.893.839	40.695.407.006	77,6	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.908.470.618	1.126.953.937	59,05	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	104.553.000	102.742.900	98,27	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.803.917.618	1.024.211.037	56,78	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.696.751.629	31.731.890.094	77,97	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.696.751.629	31.731.890.094	77,97	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.822.239	56.063.000	90,68	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	47.082.870	42.172.000	89,57	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.739.369	13.891.000	94,24	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.403.555.062	2.738.058.960	80,45	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.000.000	45.750.000	53,82	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.711.299.832	1.326.536.000	77,52	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	441.836.166	310.453.000	70,26	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.036.633.978	934.707.960	90,17	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.566.714	44.556.000	84,76	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	76.218.372	76.056.000	99,79	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.199.587.434	938.800.000	78,26	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.199.587.434	938.800.000	78,26	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.117.708.500	2.917.608.555	93,58	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	12.000.000	100	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	808.949.480	703.992.435	87,03	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.296.759.020	2.201.616.120	95,86	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.055.998.357	1.186.032.460	57,69	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	1.288.256.020	941.469.120	73,08	

			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	327.400.000	166.491.000	50,85	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	440.342.337	78.072.340	17,73	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	19.649.106.918	12.214.799.816	62,16	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	16.455.105.760	11.272.420.408	68,5	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	6.963.576.910	5.128.520.668	73,65	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	9.491.528.850	6.143.899.740	64,73	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	319.393.360	244.973.510	76,7	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	272.658.360	202.398.560	74,23	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	46.735.000	42.574.950	91,1	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	34.070.600	32.681.500	95,92	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	34.070.600	32.681.500	95,92	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	3.221.100	2.732.200	84,82	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	3.221.100	2.732.200	84,82	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	64.269.500	12.940.600	20,13	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	64.269.500	12.940.600	20,13	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.773.046.598	649.051.598	23,41	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.773.046.598	649.051.598	23,41	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	19.047.416.797	13.169.645.547	69,14	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	57.317.900	21.429.100	37,39	

3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	57.317.900	21.429.100	37,39	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	15.899.941.489	10.152.153.996	63,85	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9.867.045.791	8.910.611.139	90,31	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	1.624.705.005	1.133.556.877	69,77	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	4.408.190.693	107.985.980	2,45	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.090.157.408	2.996.062.451	96,96	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	3.090.157.408	2.996.062.451	96,96	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.904.568.756	3.162.447.250	80,99	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	3.352.816.490	2.709.184.880	80,8	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.352.816.490	2.709.184.880	80,8	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	414.263.800	322.363.660	77,82	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	414.263.800	322.363.660	77,82	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	137.488.466	130.898.710	95,21	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	53.314.306	48.791.350	91,52	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	84.174.160	82.107.360	97,54	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.133.555.040	1.924.505.861	90,2	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	2.133.555.040	1.924.505.861	90,2	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	621.141.692	548.654.460	88,33	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.512.413.348	1.375.851.401	90,97	

3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.681.781.890	1.598.470.780	95,05	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.07.2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.681.781.890	1.598.470.780	95,05	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.07.2.01.0001		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.484.895.890	1.411.559.880	95,06	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.07.2.01.0002		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	29.723.500	29.577.000	99,51	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.07.2.01.0003		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	67.162.500	58.946.400	87,77	
3.27	3.27.2.09.0.00.10.0000	3.27.07.2.01.0005		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	98.387.500	98,39	
				Jumlah	109.484.566.185	80.810.017.470	73,81	

Dari gambaran aspek keuangan diatas , dapat kami jelaskan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan mengampu dua urusan yaitu, urusan pertanian dan urusan pangan . Urusan Pertanian diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dimana terdapat 6 (enam) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.860.323.240 dan realisasi sebesar Rp.72.765.276.260 atau 73,60% sedangkan Urusan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dimana terdapat 3 (tiga) program, 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.624.242.945 dan realisasi sebesar Rp.8.044.741.210 atau 75,72 % . total realisasi keuangan Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebesar Rp. **80.810.017.470** atau sebesar **73,81%**. Terdapat sub kegiatan dengan nilai realisasi keuangan yang masih rendah (dibawah 75%) , berdasarkan hasil analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja maka dapat kami jelaskan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan dengan target fisik Nilai LkjIP Tahun 2024 sebesar 100%, dan terealisasi adalah 100% dengan pagu anggaran Rp52.443.893.839 dan realisasi sebesar Rp40.644.955.446 (76%) dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi dengan terdiri dari 2 sub kegiatan dengan target fisik sebanyak 7 (tujuh) dokumen dan terealisasi sebanyak 7 (tujuh) dokumen atau capaian kinerja sebesar 100%, dengan pagu Rp.1.908.470.618 dengan realisasi serapan Rp.1.126.953.937 dengan prosentase serapan keuangan 59,05%, dimana pagu Rp1.803.917.618 hanya terealisasi Rp.999.463.477 (55%)

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari satu sub kegiatan dengan target fisik yaitu Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu sebanyak 2240 orang/bulan dan terealisasi sebesar 2172 orang/bulan (96%) dengan pagu anggaran Rp40.696.751.629 dan terealisasi sebesar Rp31.731.890.094 (77%) .Ini dikarenakan Anggaran yang dialokasikan untuk kondisi existing pegawai desember 2023 dan selama tahun anggaran 2024 terdapat pegawai yang pensiun, selain itu juga terdapat perbedaan ketentuan besaran tambahan penghasilan PPPK tahun sebelumnya dengan tahun 2024 sehingga anggaran tidak terserap maksimal.
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan target fisik yaitu Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100% (100%), dengan pagu Rp.61.822.239 dan realisasi Rp.56.063.000 (90,68%)
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan dengan target fisik yaitu jumlah kebutuhan operasional perkantoran yang tersedia tepat waktu sebanyak 41 paket dengan realisasi sebesar 41 paket (100%), dengan pagu Rp.3.403.555.062 dan realisasi sebesar Rp.2.738.058.960 (80,45%)
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, dengan target fisik yaitu Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu sebanyak 36 laporan dan terealisasi sebanyak 36 laporan (100%) dengan pagu Rp.3.117.708.500 dengan realisasi Rp.2.917.608.555 (93,58%)
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari satu sub kegiatan dengan target fisik yaitu jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan tepat waktu sebanyak 15 unit dan terealisasi semua sebanyak 8 unit atau capaian kinerja sebesar 53%, dengan pagu Rp.1.199.587.434 dengan realisasi Rp.938.800.000 (78,26%)
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan target fisik yaitu Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik sebanyak 512 unit dan terealisasi semua sebanyak 586 unit dan hanya tercapai kinerja sebesar 87%, dengan pagu sebesar Rp.3.589.636.386 dengan realisasi sebesar Rp.3.423.862.692 (97,14%)

8) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, dengan target fisik yaitu Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor) adalah 124.258,11 Ton dan realisasi sebesar 126.552,64 Ton (101%) dengan pagu Rp19.649.106.918 dan realisasi Rp12.214.799.816 (63%), yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, dengan target fisik yaitu Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis) adalah sebanyak 127 Kelompok dan teralisasi sebanyak 127 kelompok(100%) dengan pagu pagu sebesar Rp.16.455.105.760 dan terealisasi sebesar Rp.11.272.420.408 (68,50%) disebabkan karena pada sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian terdapat aktivitas yaitu pemberian subsidi AUTS yang tidak dapat dilaksanakan karena pembatalan kebijakan dari kementerian pertanian terkait perjanjian kerjasama AUTS.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan target fisik yaitu Persentase Peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi) sebesar 0,4% tercapai 0,4% (100%) dengan pagu anggaran Rp.272.658.360 dan **realisasi** anggaran Rp.202.398.560 (74,23%)
- 3) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari satu sub kegiatan dengan target Jumlah sampel pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu sebanyak 25 sampel dan terealisasi sebanyak 25 sampel (100%) dengan pagu anggaran Rp.34.070.600 dan realisasi sebesar Rp.32.681.500 (95,92%)
 - 4) Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer yang terdiri dari satu sub kegiatan dengan target fisik Jumlah Pengecer obat hewan yang diawasi sebanyak 7 pengecer dan terealisasi sebanyak 7 pengecer (100%), dengan pagu Rp.3.221.100 dan realisasi Rp.2.732.200 (84,82%)
 - 5) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari satu sub kegiatan dengan target fisik Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan sebanyak 9 kelompok

teralisasi sebanyak 9 kelompok (100%) dengan pagu Rp.64.269.500 hanya teralisasi Rp.12.940.600 (20,13%) .

- 6) Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota Lain yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, dengan target fisik yaitu Jumlah ternak yang terpelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas sebanyak 400 ekor dan teralisasi sebanyak 200 ekor (50%) dengan pagu Rp.2.773.046.598 dengan realisasi Rp.649.051.598 (23,41%) disebabkan karena sub kegiatan pengadaan bibit ternak yang sumber pendanaan dari belanja hibah sebagian tidak teralisasi akibat adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.10/4473/SJ terkait penundaan pemberian hibah menjelang pilkada

- b. Program Penyediaan Pengembangan Prasarana Pertanian yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan , dengan target fisik yaitu Luas Tanam Padi 20844 Ha dan terealisasi sebanyak Ha (100%) dengan pagu Rp19.047.416.797 dan terealisasi sebesar Rp13.169.645.547 (68%), yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang terdiri dari satu sub kegiatan dengan target fisik yaitu Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen (100%), dengan pagu Rp.57.317.900 dan realisasi keuangan sebesar Rp.21.429.100 (37,39%) yang disebabkan karena pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya terdapat beberapa aktivitas tidak tersedia dananya.
 - 2) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, dengan target fisik yaitu Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun sebanyak 7 unit dan terealisasi sebanyak 8 unit (114%) dengan pagu Rp.15.899.941.489 dengan realisasi Rp.10.152.153.996 (63,85%) disebabkan karena terdapat belanja modal tanah untuk gedung RPH Mambal tidak dapat dilaksanakan akibat tidak tersedianya dana.
 - 3) Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang terdiri dari satu sub kegiatan, dengan target fisik yaitu Jumlah sumber bibit Ternak yang dikelola dengan baik sebanyak 1 wilayah dan terealisasi sebanyak 1 wilayah (100%) dengan pagu anggaran Rp.3.090.157.408 serta realisasi Rp.2.996.062.451 (96,96%)
 - 4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, dengan target fisik yaitu Persentase hewan/ternak dan hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan sebanyak 100% dan terealisasi sebesar 100%, dengan pagu anggaran Rp3.904.568.756 dan terealisasi sebesar Rp3.162.447.250 (79%) yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari satu sub kegiatan dengan target fisik yaitu Jumlah hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan sebanyak 13 laporan dan terealisasi sebanyak 13 laporan (100%) dengan pagu Rp. 3.352.816.490 serta serapan anggaran sebanyak Rp.2.709.184.880 (80,80%).

- b) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari satu sub kegiatan dengan target fisik yaitu Jumlah aLporan sampel hewan/ternak yang diperiksa untuk peneguhan diagnosa 1 laporan dan terealisasi sebanyak 1 laporan (100%) dengan pagu Rp.414.263.800 dan serapan anggaran sebanyak Rp.322.363.660 (77,82%)
 - c) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terdiri dari dua sub kegiatan dengan target Jumlah tempat/lokasi pemotongan Hewan/Ternak dan dagingnya yang diawasi sebanyak 62 lokasi teralisasi sebanyak 62 lokasi (100%), dengan pagu Rp. 137.488.466 dan realisasi anggaran sebanyak Rp.130.898.710 (95,21%)
- 5) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, yang terdiri dari satu kegiatan dan dua sub kegiatan, dengan target % Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi sebanyak 100% atau sebesar 430 ha , dan realisasi 527 ha (122%), dengan pagu Rp.2.133.555.040 dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.924.505.861 (90,20%)
- 6) Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari satu kegiatan 4 (empat) sub kegiatan , dengan target Persentase Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan adalah sebanyak 100%, dan realisasi sebanyak 100%, dengan total pagu Rp.1.681.781.890 dengan serapan anggaran senilai Rp.1.598.470.780 (95,65%).
- 7) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat , terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan target realisasi fisik yaitu Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2024 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, dengan pagu anggaran Rp. Rp10.527.391.261 dan terealisasi sebesar Rp.7.960.347.210 (79%), yang dapat kami jabarkan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah /Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan terdiri dari 3(tiga) sub kegiatan dengan target realisasi fisik yaitu jumlah Produksi Beras sebesar 50.627,16 Ton dan tercapai sebanyak 50.637 Ton (101%), dengan pagu anggaran Rp8.645.959.776 dan realisasi anggaran sebesar Rp6.804.393.710 (79%)

- b. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi pelaksanaannya yang terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dimana target fisik ialah Jumlah Kelompok yang meningkat kemampuannya dalam pencapaian target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun adalah sebanyak 8 kelompok dan tercapai sebanyak 8 kelompok (100%), dengan pagu Rp.1.881.431.485 dengan realisasi Rp.1.155.953.500 (61,44%).
- 8) Program Penanganan Kerawanan Pangan terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan target fisik yaitu % Desa Tahan Pangan sebesar 94% dengan realisasi sebesar 94% (100%), dengan pagu Rp2.248.200 terealisasi sebesar Rp617.000 (27%), yang dapat kami jabarkan dimana kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, dengan target fisik yaitu jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan sebanyak 1 (satu) laporan dan terealisasi sebanyak 1 (satu) laporan, dengan pagu Rp.2.248.200 dan realisasi Rp.617.000 (27%), karena sebagian belanja sudah melalui [dana APBN](#).
- 9) Program Pengawasan Keamanan Pangan terdiri dari terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan target fisik yaitu Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT) sebanyak 4 komoditi dan terealisasi sebesar 4 komoditi (100%) dengan pagu anggaran Rp94.603.484 dan terealisasi sebesar Rp83.777.000 (88%), yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
- 10) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota terdapat satu sub kegiatan dengan target Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebanyak 3 kelompok dan terealisasi 3 kelompok (100%), dengan pagu Rp.94.603.484 realisasi Rp.83.777.000 (88,56%).

3.4 Prestasi Yang Diraih

Prestasi yang diraih selama tahun 2022-2024 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung antara lain :

1. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 sebagai Badan Publik Informatif
2. BPP Berprestasi Peringkat II (Kedua Tingkat Provinsi Bali Tahun 2022
3. Kabupaten dengan Indeks Ketahanan Pangan Terbaik II Tahun 2022
4. Top 15 Inovasi Pelayanan Publik “Asparagus ditanam ekonomi mapan” Tahun 2024
5. Anugerah Mangupura Award peringkat VI Tahun 2024
6. Peringkat VII Pelayanan Publik Terbaik di Kabupaten Badung
7. BPP Petang Peringkat I Tingkat Provinsi Bali Tahun 2024
8. Peringkat III Nasional Produktivitas Padi tertinggi Tahun 2023



4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun sebagai jabaran visi dan misi kepala daerah serta strategi OPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 4 (Empat) indikator.

BAB IV **PENUTUP**

Berdasarkan uraian dari bab-bab tersebut diatas , maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengingat berbagai tantangan yang disebabkan oleh faktor alam , seperti dampak el nino, serangan hama penyakit dan bencana alam, dari 4 (Empat) indikator kinerja, 2 (dua) indikator telah melampaui target dan 2(Dua) indikator lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Presentase Peningkatan Produksi Pangan Strategis tercapai 600%
 - b. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan tercapai 100,7%
 - c. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan tercapai 96,8%
 - d. Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian tercapai 99,91 %
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka skala nilai peringkat kinerja berdasarkan capaian 4 (empat) indikator sasaran tergolong dalam kategori tinggi.
3. Tidak tercapainya beberapa target kinerja yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa faktor eksternal :
 - Perubahan dan variabilitas iklim yang terjadi secara global yaitu terjadinya el nino. El nino merupakan perubahan iklim global yang berdampak di seluruh Indonesia tidak hanya di Kabupaten Badung yang mengakibatkan curah hujan menurun / musim kemarau yang berkepanjangan dan ini sangat berpengaruh terhadap produksi pangan 2024 dan 2024.
 - Terjadinya alih fungsi lahan
 - Perbaikan prasarana pertanian yang mengakibatkan tertundanya masa tanam
 - Menurunnya ketersediaan air
4. Tidak tercapainya indikator sasaran indeks reformasi birokrasi disebabkan karena pada tahun 2024 inspektorat Kabupaten Badung tidak melaksanakan evaluasi mandiri sehingga dalam pelaporan ini masih menggunakan hasil evaluasi tahun 2022 dan Nilai LKJIP sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi

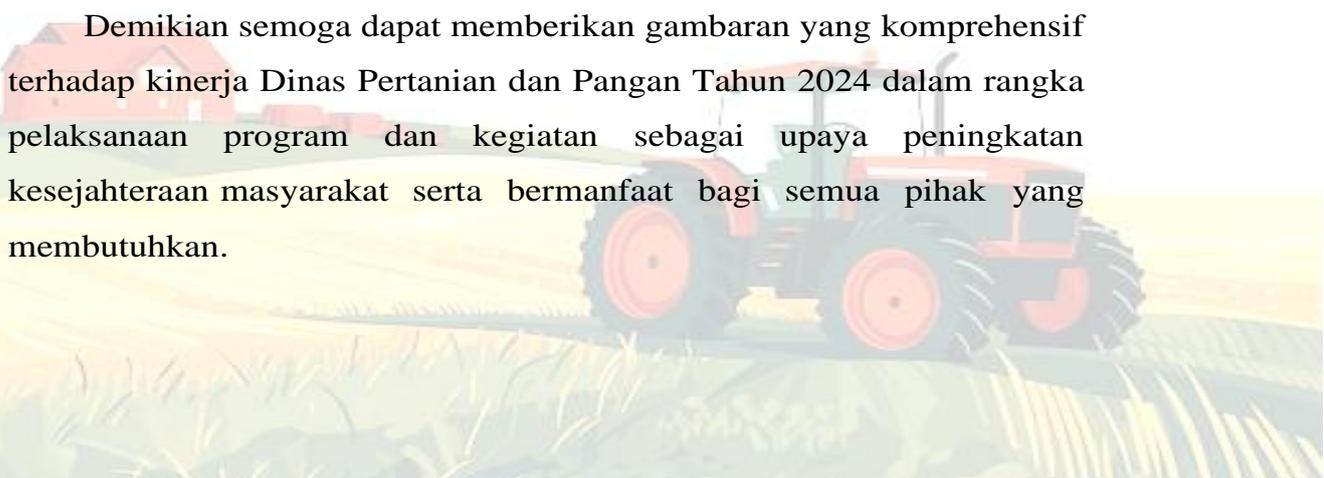
4.2 Rekomendasi

Dalam rangka perbaikan kinerja kedepan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga bisa dilakukan antisipasi apabila terjadi perubahan cuaca yang ekstrem maupun perbaikan saluran irigasi yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman.
2. Melakukan penyempurnaan terhadap pohon kinerja sehingga sehingga dapat dirumuskan sasaran kinerja yang seharusnya dicapai dan didukung dengan program/kegiatan yang benar-benar dapat mencapai output dan outcome yang mendukung pencapaian target kinerja.
3. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan dana CSR.
4. Merintis kerjasama dengan berbagai organisasi untuk memperluas akses pemasaran.
5. Merancang berbagai program terobosan / inovasi khususnya dengan memanfaatkan sistem informasi/elektronik
6. Mengusulkan dilakukannya revisi terhadap Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian semoga dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.



4.3 Program Inovasi

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Salah satu upaya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat adalah dengan mengembangkan program-program inovasi sesuai dengan kewenangan yaitu :

1. Inovasi MATANABE (Masyarakat Tanam Cabe) , Antisipasi kenaikan harga cabai
2. Inovasi sistem aplikasi Bang GoNi (Badung Go Tani)
3. Inovasi BANG ROMI (Badung Promo Tani)
4. Inovasi Mangupura Vet Klinik
5. Inovasi SIBERTANI (Siswa Belajar Bertani)
6. SIDUTA (Siswa Edu Wisata)
7. Inovasi TAK GIGIT HABIS (Tata Laksana Gigitan Hewan Rabies)
8. Inovasi Si-Traktor (Sistem Informasi Dan Tatalaksana Rekomendasi Solar Untuk Traktor)
9. Inovasi SAMPI Digital

Mangupura, Februari 2025
Kepala Dinas Pertanian dan
Pangan Kabupaten Badung,

